

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

Untuk menjawab permasalahan terkait strategi Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas kader, pada penelitian ini akan menggunakan teori partai politik dan juga teori kaderisasi.

#### 1. Partai Politik

##### a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara untuk turut andil dalam pengelolaan negara. Partai politik tidak terbentuk begitu saja, melainkan keberadaannya melalui proses *history* yang panjang, meskipun partai politik tergolong baru terbentuk. Oleh karena itu partai politik merupakan sebuah organisasi yang baru dalam kehidupan bernegara, dan keberadaan partai politik baru muncul setelah jauh terbentuknya organisasi negara. Dalam kehidupan negara demokratis, partai politik digunakan untuk mewakili aspirasi masyarakat serta untuk memperjuangkan kepentingan – kepentingan tertentu<sup>1</sup>. Partai politik merupakan bagain penting dalam perjalanan perpolitikan suatu negara, karena partai politik juga digunakan oleh individu maupun kelompok dalam meraih kekuasaan. Dengan adanya berbagai partai politik maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu koalisi atau kontestasi partai politik dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat mewarnai perpolitikan suatu negara<sup>2</sup>.

Definisi partai politik secara umum adalah individu yang membentuk sebuah kelompok secara terorganisir, serta mempunyai tujuan, cita – cita dan ideologi yang sama. Tujuan utama dibentuknya partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik, dengan cara memenangkan persaingan kontestasi politik terhadap partai politik yang tidak sepaham<sup>3</sup>. Adapun beberapa definisi partai politik menurut para ahli antara lain:

---

<sup>1</sup>M. Prakoso Aji, Perkembangan dan Dinamika Partai Politik di Era Reformasi, *Parpolitika Journal of Politics and Democracy Studies* 1, no.1, (2020): 4.

<sup>2</sup> Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembangunan Politik, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8, no. 1, (2012): 137.

<sup>3</sup> Peyerli Pasaribu, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial PolitikUMA* 5, no. 1, (2017): 53.

- 1) Carj J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik merupakan manusia yang membentuk suatu kelompok secara terorganisir dan stabil, serta mempunyai cita – cita untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, dari kekuasaan yang diperoleh tersebut akan memberikan dampak positif terhadap anggotanya yang bersifat ideal dan juga materiil.
- 2) R.H Soltou berpendapat bahwa partai politik adalah warganegara yang membentuk sebuah kelompok secara terorganisir, dan menjalankan kesatuan politik melalui kekuasaan memilih, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan menerapkan kebijakan umum mereka dalam pemerintahan.
- 3) Sigmund Neuman berpendapat bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas politik, dan memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, dengan cara mendapatkan dukungan dari rakyat untuk memperoleh kemenangan terhadap golongan maupun partai politik yang tidak sepaham.
- 4) Miriam Budiarmo mengemukakan pendapatnya bahwa partai politik merupakan sebuah kelompok yang terstruktur, yang anggotanya memiliki kecenderungan yang sama terkait cita – cita, ideologi, serta tujuan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui cara konstitusional, serta mengimplementasikan kebijakan mereka<sup>4</sup>.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian politik tersebut, bahwa keberlangsungan suatu partai politik terletak pada anggota partai. Partai politik memiliki kewajiban, hak, serta kedudukan yang sama, dan bersifat mandiri. Meskipun partai politik memiliki hak dan kedudukan yang sama, tetapi partai politik mempunyai tujuan yang berbeda – beda sesuai visi, misi, yang dimiliki partai politik tersebut. Meskipun tujuan yang dimiliki partai politik berbeda – beda, tapi secara fundamental tujuan partai politik adalah untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, serta mengimplementasikan kebijaksanaan partai yang telah dibuat, sesuai dengan aturan serta batasan – batasan yang telah ditentukan. Jadi setiap tujuan partai politik telah diatur dalam pasal 6 Undang – Undang No. 31 tahun 2002, yang salah satu

---

<sup>4</sup> Zainal Abidin Saleh, Demokrasi dan Partai Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1, (2008): 69.

poinnya berbunyi “memperjuangkan cita – citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Terkait tujuan partai politik, tidak boleh menyimpang dari undang – undang tersebut<sup>5</sup>.

#### **b. Tujuan Partai Politik**

Dibentuknya suatu organisasi, tentunya mempunyai suatu cita – cita atau tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga termasuk organisasi partai politik, yang mana tujuan utama dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan dan juga mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan<sup>6</sup>. Adapun dibentuknya partai politik memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- 1) Menjadi tempat bagi rakyat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, untuk ikut andil dalam mewarnai perpolitikan dalam suatu negara.
- 2) Sebagai tempat untuk memperjuangkan kepentingan organisasi dalam pemerintahan.
- 3) Sebagai sarana untuk memperoleh serta mempertahankan kekuasaan politik dalam pemerintahan.
- 4) Sebagai tempat berkumpulnya individu atau kelompok warga negara yang mempunyai kesamaan kepentingan, cita – cita, dan juga ideologi.
- 5) Sebagai tempat bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan negara<sup>7</sup>.

#### **c. Fungsi Partai Politik**

Partai politik dalam menjalankan fungsinya, harus dapat menampung berbagai aspirasi dan pendapat dari masyarakat, yang kemudian berbagai pendapat tersebut diolah serta dirumuskan untuk disalurkan kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan hasil dari tuntutan kebijakan umum<sup>8</sup>. Adapun partai politik memiliki beberapa fungsi antara lain:

---

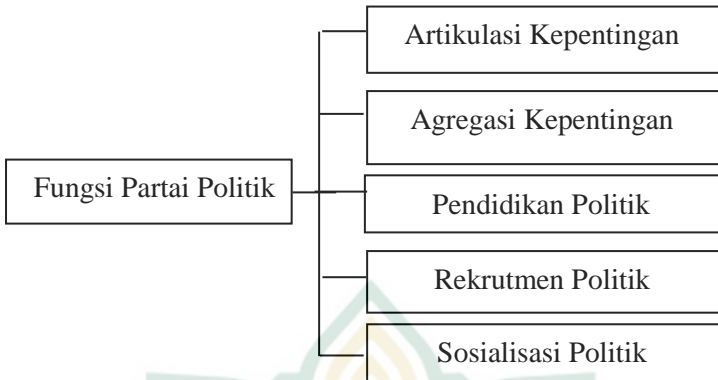
<sup>5</sup> Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Indonesia, *Jurnalica* 1, no.1, (2004): 80-81.

<sup>6</sup> Yuni Femelia, *Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam meningkatkan Kualitas Berpolitik Studi Pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung*, (Lampung : Universitas Raden Intan, 2017), 49.

<sup>7</sup> Ellya Rosana, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, 147.

<sup>8</sup> Henry Arianto, *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Indonesia*, 82-83.

Gambar 2.1 Fungsi Partai Politik



- 1) Partai politik sebagai artikulasi kepentingan
 

Sebagai artikulasi kepentingan, partai politik akan menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat, kemudian aspirasi tersebut disalurkan kepada wakilnya yang duduk dikursi legislatif, sehingga aspirasi yang disalurkan partai politik, kepentingan partai politik, lebih mudah mempengaruhi kebijakan pemerintah karena ada yang mengawal dan juga ada yang mewakili dalam membawa kepentingan tersebut. Dengan bantuan lembaga legislatif maka pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Partai politik sebagai agregasi kepentingan
 

Fungsi partai politik sebagai agregasi kepentingan yaitu mengolah berbagai perbedaan aspirasi masyarakat, baik aspirasi yang disampaikan individu maupun kelompok. Dalam hal ini partai politik berfungsi untuk mencari solusi yang tepat guna mengolah perbedaan aspirasi atau kepentingan, sehingga menjadi sesuatu rumusan yang dapat memberikan pengaruh penting dalam pembuatan kebijakan. Dalam fungsi ini, penting sekali untuk memperoleh kesepahaman dalam pembuatan kebijakan yang kemudian diimplementasikan untuk dilaksanakan<sup>9</sup>.
- 3) Partai politik sebagai pendidikan politik
 

Pendidikan politik merupakan suatu hal yang penting dilakukan guna untuk memperkenalkan bagaimana berpolitik, membentuk sikap serta etika dalam berpolitik,

<sup>9</sup> Elly Rosana, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, 145.

sebagai sarana untuk mewariskan ilmu dan pengetahuan kegenerasi selanjutnya. Dalam memberikan pendidikan politik, partai politik memiliki cara yang berbeda, tergantung objek yang diberikan pendidikan. Jika yang diberikan pendidikan adalah kader partai, maka pendidikan akan dilakukan secara sistematis dan memiliki jenjang kaderisasi, yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan partai<sup>10</sup>. Sedangkan jika pendidikan diberikan terhadap masyarakat umum, maka partai akan memberikan pendidikan tentang kesadaran warga terkait hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>11</sup>.

4) Partai politik sebagai rekrutmen politik

Rekrutmen partai politik merupakan salah satu fungsi penting yang dilakukan oleh partai politik, karena partai politik akan menempatkan kader terbaik dari hasil rekrutmen yang dilakukan, untuk menempati jabatan – jabatan tertentu, bahkan menempati jabatan legislatif atau eksekutif setelah menjadi pemenang dalam pemilihan umum<sup>12</sup>.

5) Sosialisasi Politik

Partai politik juga memiliki fungsi sebagai sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses dalam membentuk sikap serta pandangan politik terhadap masyarakat, terkait fenomena politik yang sedang terjadi. Dalam sosialisasi politik, partai politik juga memperkenalkan beberapa program partai dengan tujuan pada saat pemilihan umum, masyarakat dapat memilih partai tersebut<sup>13</sup>.

## 2. Kaderisasi

### a. Pengertian Kaderisasi

Kaderisasi merupakan suatu hal yang penting bagi partai politik untuk dilakukannya, guna mempersiapkan dan mencetak calon pemimpin yang nantinya akan melanjutkan perjuangan

---

<sup>10</sup> Yuni Femelia, *Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik Studi Pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung*, 20.

<sup>11</sup> Wery Gusmansyah, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 2, (2019): 185.

<sup>12</sup> Benito Asdhie Kodiyat, Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan, *Jurnal Edu Tech* 5, no. 1, (2019): 6.

<sup>13</sup> Maria Yeti Adrias, Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan (Kajian Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik), *Legal Pluralism* 8, no. 2, (2018): 146.

partai serta menjadi calon pemimpin dimasa yang akan datang. Proses kaderisasi yang dilakukan partai politik atau suatu organisasi adalah untuk mendidik seseorang, agar kelak dapat melanjutkan kepemimpinan dalam organisasi atau berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan partai. Kaderisasi yang dilakukan oleh negara – negara barat dalam mempersiapkan calon pemimpin, sudah dilaksanakan dan terstruktur secara matang. Kemampuan yang dimiliki seorang kader dapat memberikan peranan penting dalam partai politik. Selain itu kader juga mendapatkan posisi yang strategis untuk melanjutkan eksistensi partai politik. Hal tersebut dapat dijadikan contoh organisasi atau partai yang ada di Indonesia, agar lebih memperhatikan dan melakukan secara matang terkait proses kaderisasi yang dilakukan<sup>14</sup>.

Secara umum proses kaderisasi yang dilakukan organisasi atau partai politik adalah menanamkan ide terhadap kadernya. Ide dalam proses kaderisasi dianggap sangat penting, karena mengandung berbagai hal meliputi agenda kegiatan yang akan didiskusikan, rangkaian pertanyaan yang perlu diajukan, sehingga dengan penanaman ide tersebut kader dapat melihat jelas tentang karakteristik partai serta tujuan yang hendak dicapai oleh partai atau organisasi. Jika tidak adanya ide dalam partai politik, maka suatu partai politik tidak akan memiliki dasar landasan yang jelas dan juga akan kalah bersaing dengan partai yang lainya. Dalam hal ini ide menjadi identitas partai yang membedakan dengan partai yang lainya, sebagai ciri khas partai dengan tujuan menjadi jawaban permasalahan yang dialami masyarakat saat ini. Oleh karena itu seorang kader diharuskan dapat memahami secara detail terkait ide dari partai politik, dan juga partai politik harus mempersiapkan secara matang untuk mendudukkan kadernya dalam jabatan yang strategis<sup>15</sup>.

Hal yang terlihat jelas dari fungsi kaderisasi adalah untuk mempersiapkan kader yang berkualitas, untuk dapat ditempatkan dalam jabatan penting seperti jabatan legislatif, maupun eksekutif. Dalam organisasi maupun partai politik

---

<sup>14</sup> Yusa Djuyandi, Fifi Lutfiah Sodikin, Proses Kaderisasi Keadilan Sejahtera Dalam Mempertahankan Eksistensi Partai Politik Menjelang Pemilu Tahun 2014, *Society* 7, no. 1, (2019): 15.

<sup>15</sup> Muhammad, Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Kasus Usung Non Kader DPD PAN Kabupaten Majene, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin* 2 no. 1, (2016): 113.

memang membutuhkan kader yang berkualitas, karena dengan kader yang berkualitas sebuah organisasi atau partai politik mempunyai peluang lebih besar untuk lebih berkembang dan lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Partai politik merupakan sebuah kendaraan yang dipersiapkan untuk mempersiapkan kader yang berkualitas, yang akan dijadikan calon pemimpin untuk menduduki posisi tertentu dalam jabatan publik. Kader yang dihasilkan partai politik untuk menempati jabatan tertentu ada yang dapat dipilih langsung oleh rakyat, dan juga ada yang tidak dapat dipilih langsung oleh rakyat. Misal kader yang dapat dipilih langsung oleh rakyat adalah untuk menempati jabatan tertentu, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden beserta wakilnya, dan yang lainnya<sup>16</sup>.

Fungsi utama dari kaderisasi adalah memberikan pembinaan terhadap seorang calon pemimpin agar dapat mengembangkan diri, dengan tujuan kader dapat melanjutkan keberlangsungan eksistensi partai politik. Dalam mempersiapkan pemimpin dimasa yang akan datang, maka pemimpin dimasa sekarang harus melakukan pembinaan terhadap kader, agar kelak dapat berperan penting dalam melanjutkan kepemimpinan. Secara umum kaderisasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu subyek dan obyek. Kategori subyek merupakan seorang atau sekumpulan orang dalam organisasi, yang berfungsi untuk mempersiapkan regenerasi serta tugas – tugas dalam sebuah organisasi. Sedangkan kategori obyek merupakan individu atau kelompok yang diberikan pembinaan dan dipersiapkan untuk melanjutkan keberlangsungan partai<sup>17</sup>.

Sistem kaderisasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembinaan kader, terkait proses pendidikan kader dalam penyampaian visi, misi partai politik, pengetahuan politik, sejarah partai politik, dan strategi partai politik. Tidak hanya itu, sistem kaderisasi juga dapat membuat kader mendapatkan serta mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya. Dalam sistem kaderisasi ada empat hal yang penting sekali untuk diperhatikan yaitu, pelaku dalam kaderisasi (orang yang memberikan pembinaan dalam kaderisasi), target kaderisasi (kader yang

---

<sup>16</sup> Arima Ratih Tanjungsari, *Gerakan Dakwah Sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jawa Tengah)*, (Universitas Negeri Semarang, 2016), 31.

<sup>17</sup> Rika Maulida, *Metode Kaderisasi Kepemimpinan Menurut Hasan Al- Banna*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020), 32.

diberikan pembinaan), proses serta tahapan dalam kaderisasi, kurikulum pendidikan dalam kaderisasi. Pelaku kaderisasi merupakan suatu organ yang mempunyai fungsi mempersiapkan fasilitas, yang diperlukan dalam menyelenggarakan proses kaderisasi. Target atau obyek kaderisasi merupakan kader yang diberikan pembinaan atau pelatihan, guna menjadi kader yang sesuai dengan harapan partai. Proses atau kurikulum dalam kaderisasi merupakan bagian terpenting dalam kaderisasi, yang mana ada beberapa tingkatan yang harus dilalui kader dengan pedoman yang telah ditentukan. Biasanya dalam proses dan kurikulum yang digunakan dalam kaderisasi, tergantung anggaran dana yang dikeluarkan serta peraturan yang berlaku dalam partai politik<sup>18</sup>.

Kaderisasi merupakan sebuah pembinaan atau pendidikan terhadap kader dengan materi yang telah ditentukan, yang bertujuan menempatkan kader dalam jabatan politik untuk mewakili partai. Meskipun seseorang telah menjadi anggota dalam partai politik, belum tentu anggota tersebut dapat dikatakan seorang kader. Untuk menjadi seorang kader, anggota tersebut haruslah melewati seleksi dan prosedur yang telah ditentukan oleh partai politik. Setelah anggota tersebut lolos dari seleksi kaderisasi, baru anggota tersebut dapat mengikuti pendidikan atau pembinaan kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik. Dalam proses kaderisasi, calon kader akan mendapatkan materi – materi terkait kaderisasi yang diadakan oleh partai politik. Tujuan khusus dilakukannya kaderisasi adalah untuk menambah kualitas kader, yang diharapkan kelak dapat melanjutkan kepemimpinan partai politik serta membantu dalam meraih kepentingan partai. Pembinaan yang dilakukan oleh partai politik, lebih ditekankan terhadap pengembangan program – program partai politik, yang nantinya dengan pengembangan program tersebut dapat meningkatkan kualitas program partai politik itu sendiri<sup>19</sup>.

Pendidikan yang dilakukan partai politik terhadap kader dalam proses kaderisasi, merupakan suatu bentuk investasi partai dimasa yang akan datang, yang mana kader diharapkan

---

<sup>18</sup> Zulfadli Rahman Siregar, *Partai Politik dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemuda)*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2020), 27.

<sup>19</sup> Siti Efrayanti Batubara, *Ideologi dan Pola Rekrutmen Kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatra Utara Tahun 2016-2021*, (Medan: Universitas Negeri Sumatra Utara, 2018), 64.



kelak dapat mengemban tanggung jawab dalam meneruskan fungsi, perjuangan, serta mengembangkan partai menjadi lebih baik lagi<sup>20</sup>. Pendidikan yang dilakukan partai politik dalam kaderisasi dibagi menjadi dua, yaitu secara informal dan formal, sebagai berikut:

#### 1. Kaderisasi informal

Kaderisasi informal adalah kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik untuk mempersiapkan kader sebagai calon pemimpin, yang mana kaderisasi dilakukan secara tidak terencana, terarah, sistematis, dan juga tidak terikat dengan kurikulum tertentu. Kaderisasi informal ini, dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, baik dapat dilakukan dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat. Dalam kaderisasi ini lebih berfokus terhadap pembentukan karakter seseorang dengan menanamkan akhlak serta sikap yang baik terhadap kader. Pembentukan karakter tersebut harus dimulai sejak dini dan harus dibiasakan secara terus menerus, sehingga kader akan terbiasa dengan karakter atau sikap yang sudah dipupuk sejak dini. Dalam kaderisasi ini, dapat diketahui kelebihan serta kekurangan seorang kader, yang mana dapat dilihat dari rekam jejak organisasi yang telah diikuti. Dalam kaderisasi ini, juga dapat diketahui akhlak dan sikap seorang kader yang dapat dilihat dari proses sosialisasi yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>21</sup>. Melalui kaderisasi ini juga diharapkan sikap negatif seorang kader dapat dihilangkan dan dirubah menjadi sikap dan akhlak yang lebih baik.

#### 2. Kaderisasi formal

Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik dalam mempersiapkan kader untuk menjadi seorang calon pemimpin, yang mana kaderisasi dilakukan secara teratur, sistematis, dengan memuat pendidikan penting sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan, dan mengikuti peraturan serta hukum yang

---

<sup>20</sup> Abdul Hadi, *Manajemen Pengkaderan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta Priode 2011 – 2016 Dalam Rangka Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai*, 20.

<sup>21</sup> Yuni Femelia, *Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam meningkatkan Kualitas Berpolitik Studi Pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung*, 31.

diberlakukan dalam partai politik<sup>22</sup>. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kaderisasi formal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kader sebagai berikut:

- 1) Kader diberikan kesempatan untuk menempati jabatan tertentu guna membantu pemimpin.
- 2) Memberikan pelatihan terhadap kader baik di dalam maupun di luar organisasi.
- 3) Kader diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam program mempersiapkan calon pemimpin, yang dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 4) diberikanya tugas kader senantiasa terus belajar<sup>23</sup>.

#### **b. Prinsip prinsip dalam kaderisasi**

Menurut Haris et al. kaderisasi dapat dilaksanakan dengan baik jika memperhatikan beberapa prinsip yaitu terbuka, non-diskriminatif, berjenjang. Adapun beberapa prinsip tersebut sebagai berikut:

##### **1. Terbuka**

Kaderisasi dalam prinsip terbuka, dapat diartikan bahwa kaderisasi yang diselenggarakan dapat diikuti oleh semua anggota yang tergabung dalam partai politik ataupun organisasi. Dalam hal ini setiap anggota yang tergabung dalam partai politik, memiliki peluang yang sama untuk mengikuti proses pembinaan dan kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan dalam proses kaderisasi<sup>24</sup>.

##### **2. Non-diskriminatif**

Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi merupakan suatu prinsip yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota partai politik, untuk dapat mengikuti proses kaderisasi dan juga mendapatkan peluang yang sama dalam memperoleh promosi jabatan, kenaikan karir politik, dalam

---

<sup>22</sup>Novia Putri Pangesti, *Kaderisasi Partai Politik Dalam Mengupayakan Kualitas Ideologi Penelitian Deskriptif – Kualitatif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2020), 16.

<sup>23</sup> Farid Nofiard, *Kaderisasi Kepemimpinan Pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalu Kabupaten Hulu Sungai Selatan* 268.

<sup>24</sup> Raden Gilang Candra Negara, *Sistem Kaderisasi Partai Politik( Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2019), 29.

proses kaderisasi yang dilakukan tanpa membeda – bedakan ras, warna kulit, golongan, dan yang lainnya<sup>25</sup>.

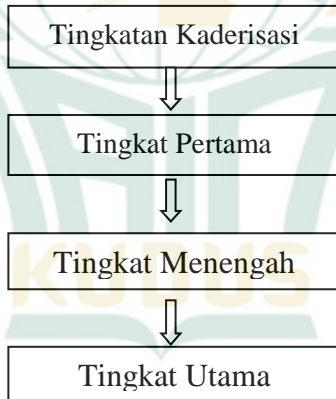
3. Berjenjang

Kaderisasi dalam prinsip berjenjang akan didasarkan terhadap pendidikan yang bertahap atau bertingkat. Kaderisasi dalam prinsip ini disusun secara sistematis, yang mana pendidikan dalam kaderisasi dilakukan secara bertingkat, yang dimulai dari tingkat dasar kemudian ketahap selanjutnya hingga sampai tahap yang terakhir. Kaderisasi berjenjang ini dilakukan guna untuk memberikan materi pendidikan terhadap kader secara bertahap, dan juga memberikan penjenjangan terhadap tahapan karir kader dalam partai politik<sup>26</sup>.

**c. Tingkatan dalam kaderisasi**

Kaderisasi pada umumnya dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, tingkat pertama, tingkat menengah, dan juga tingkat utama<sup>27</sup>. Adapun tingkatan kaderisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tingkatan kaderisasi



<sup>25</sup> Desy Nur Fitriah, *Pendidikan Politik Kader di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 14.

<sup>26</sup> Siti Ana, *Kaderisasi dan Keterpilihan Caleg DPRK Paartai Gerinda Pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 17- 18.

<sup>27</sup> Desy Nur Fitriah, *Pendidikan Politik Kader di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)*, 15.

### 1. Tingkat pertama

Kaderisasi yang dilakukan pada tingkat pertama lebih difokuskan terhadap internalisasi partai, meliputi penanaman ideologi partai, pengenalan visi dan misi partai politik. Selain itu dalam tingkat kaderisasi pertama ini, kader juga diberikan pelatihan terkait tata kelola partai dan juga manajerial yang bersifat mendasar. Adapun pelatihan dasar yang dilakukan meliputi dari pelatihan dalam mempersiapkan rapat, pelatihan pembuatan serta pelaksanaan progam, pelatihan kampanye dan yang lainnya. Dalam tingkatan ini, kader juga dibekali dengan pelatihan kepemimpinan dan juga diberikan pelatihan terkait strategi dalam memenangkan pemilu, termasuk pelatihan komunikasi serta *public speaking* secara dasar. Untuk kaderisasi tingkat pertama ini, kader dapat dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai tingkat kabupaten dan juga dapat dipersiapkan untuk menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten.

Diharapkan pada kaderisasi tingkat pertama ini, kader dapat menguasai materi pendidikan sebagai berikut:

- Memahami ideologi partai politik.
- Dapat mengetahui sejarah partai politik.
- Mengetahui peraturan dalam partai politik.
- Mengetahui manajerial partai politik ditingkat kabupten.
- Dapat mengikuti perkembangan isu - isu terbaru ditingkat kota atau kabupaten.
- Dapat memahami bagaimana hubungan partai politik dengan pemerintah tingkat kabupaten.
- Dapat memahami kepemiluan ditingkat kabupaten serta memahami strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilu<sup>28</sup>.

### 2. Kaderisasi tingkat menengah

Kaderisasi yang dilakukan tingkat menengah, mempunyai tujuan untuk memproyeksikan kader dalam menempati jabatan tertentu yaitu untuk menjadi pengurus partai tingkat provinsi, kader juga dapat diproyeksikan menjadi anggota DPRD tingkat provinsi, dan juga dapat diproyeksikan menjadi kepala daerah tingkat provinsi.

---

<sup>28</sup> Novia Putri Pangesti, *Kaderisasi Partai Politik Dalam Mengupayakan Kualitas Ideologi Penelitian Deskriptif – Kualitatif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, 17.

Pembinaan pada tingkat menengah lebih banyak dilakukan untuk memberikan bekal terhadap kader terkait pelatihan komunikasi politik, pelatihan kepemimpinan, pelatihan pembuatan kebijakan, pelatihan kampanye, keterwakilan politik, pelatihan komunikasi *interpersonal*, dan juga memberikan pelatihan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada tingkatan ini lebih banyak materi terkait pelatihan kepemimpinan untuk memenangkan pemilu, daripada materi terkait internalisasi partai politik. Adapun dalam kaderisasi tingkat menengah, kader diharapkan dapat menguasai antara lain:

- Mengerti tata kelola partai politik yang ada di tingkat provinsi.
- Memahami serta mengikuti isu yang sedang berkembang di tingkat provinsi.
- Dapat menguasai strategi dalam menyelesaikan masalah terkait kebijakan yang ada di tingkat provinsi.
- Dapat memahami bagaimana mekanisme pembuatan kebijakan yang ada di tingkat provinsi.
- Dapat memahi situasi hubungan antara partai politik dengan pemerintahan di tingkat provinsi.
- Dapat menguasai pelatihan kepemimpinan.
- Dapat mengetahui alur atau proses kepemiluan ditingkat provinsi serta cara yang digunakan untuk memenangkan pemilu<sup>29</sup>.

### 3. Kaderisasi tingkat utama

Kaderisasi yang dilakukan ditingkat utama, dipersiapkan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, yang akan mencakup skala nasional. Jabatan yang diperuntukkan kader dalam tingkatan ini antara lain, pemimpin partai politik, anggota legislatif tingkat pusat, bahkan menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam kaderisasi tingkat utama ini, materi yang diberikan terhadap kader akan jauh lebih kompleks. Dalam tingkatan ini, kaderisasi yang dilkakukan tidak hanya membahas internalisasi, tapi juga membahas materi yang lebih luas lagi misalnya, pendidikan kepemiluan secara mendalam baik regulasi maupun strategi pemenangan pemilu, pelatihan

---

<sup>29</sup> Novia Putri Pangesti, *Kaderisasi Partai Politik Dalam Mengupayakan Kualitas Ideologi Penelitian Deskriptif – Kualitatif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, 18-19.

kepemimpinan terkait mengatasi masalah tentang isu yang sedang berkembang di lingkup nasional, memberikan pendidikan terhadap kader mengenai kebijakan partai politik dalam lingkup nasional, memberikan pemahaman terkait hubungan internasional, hukum, dan yang lainnya. Diharapkan kader dalam kaderisasi tingkat utama ini, dapat memahami serta menguasai beberapa materi pembinaan antara lain:

- 1) Kader dapat menguasai serta memahami manajerial partai politik dalam tingkat nasional.
- 2) Dapat mengikuti serta memahami isu – isu yang berkembang di tingkat nasional.
- 3) Dapat memahami strategi dalam memecahkan masalah mengenai kebijakan dalam tingkat nasional.
- 4) Dapat memahami mekanisme pembuatan kebijakan di tingkat nasional.
- 5) Dapat memahami bagaimana hubungan partai politik dengan pemerintahan dalam tingkat nasional.
- 6) Dapat menguasai pelatihan kepemimpinan serta dapat menguasai pelatihan komunikasi interpersonal.
- 7) Dapat memahami secara baik terkait kepemiluan di tingkat nasional, serta mengetahui strategi yang digunakan dalam memperoleh kemenangan tersebut.
- 8) Dapat memahami keterikatan dengan media masa.
- 9) Dapat menguasai keterampilan dalam bernegosiasi.
- 10) Mengerti serta memahami lingkup strategis internasional.
- 11) Dapat memahami sistem ekonomi, pemerintahan, hukum, dan juga hubungan internasional<sup>30</sup>.

## B. Penelitian terdahulu

Adapun sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang sedang dilakukan, maka penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan bahan rujukan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Beberapa kajian penelitian terdahulu yang dilakukan, terkait strategi partai politik dalam melakukan kaderisasi antara lain:

---

<sup>30</sup> Novia Putri Pangesti, *Kaderisasi Partai Politik Dalam Mengupayakan Kualitas Ideologi Penelitian Deskriptif – Kualitatif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, 24-25.

1. Penelitian Arima Ratih Tunjungsari yang dilakukan tahun 2016 dengan judul, *Gerakan Dakwah Sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jawa Tengah)*. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana sistem kaderisasi yang dilakukan DPW PKS Provinsi Jawa Tengah melalui gerakan dakwah terhadap kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya?, Faktor apa saja yang mejadi kendala terkait kaderisasi yang dilakukan?, solusi apa yang diberikan DPW PKS Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kendala terkait sistem kaderisasi yang dilakukan?. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teori yaitu teori partai politik, rekrutmen politik, sistem kaderisasi, Partai Keadilan Sejahtera, dan gerakan dakwah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan diri bahwa partai ini adalah partai dakwah. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem kaderisasinya, yang memberikan pembinaan dengan corak agama yang kental dalam pelaksanaan kegiatan kaderisasi, seperti melakukan kegiatan pengajian, dauroh, ta'lim rutin, seminar, serta kegiatan – kegiatan yang lainnya. Kaderisasi PKS dilakukan secara berjenjang, yang dimulai dari:

- 1) *Ta'rif* (pengenalan).
- 2) *Taqwin* (pembinaan internalisasi nilai Islam).
- 3) *Tanfidz* (tindakan nyata pelaksanaan dakwah)<sup>31</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adalah sama – sama meneliti tentang kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Adapun perbedaanya, penelitian ini hanya memfokuskan gerakan dakwah sebagai metode kaderisasi yang dilakukan oleh PKS, serta objek penelitian yang dilakukan di DPW PKS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berfokus terhadap proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS melalui berbagai kegiatan, baik secara formal maupun informal, serta objek penelitian yang peneliti lakukan adalah di DPD Kabupaten Pati.

---

<sup>31</sup> Arima Ratih Tanjungsari, *Gerakan Dakwah Sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jawa Tengah)*, 122.

2. Novia Putri Pangesti yang dilakukan tahun 2020, dengan judul *Kaderisasi Partai Politik Dalam Mengupayakan Kualitas Ideologi Penelitian Deskriptif – Kualitatif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai, bagaimana kaderisasi partai politik dalam mengupayakan kualitas ideologi?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaderisasi partai politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PPP DIY yang dapat dilalui dengan 7 dari 4 proses pendidikan yaitu pembuatan kebijakan, tata kelola partai politik, kepemimpinan, hubungan partai politik dengan pemerintah. Adapun tiga proses lainnya yaitu memberikan pemahaman terkait dinamika dan isu yang beredar saat ini, kepemiluan, serta memberikan keterampilan dalam penyelesaian masalah<sup>32</sup>.  
Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, sama – sama membahas mengenai kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, serta adanya persamaan terkait metode penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, terkait partai politik yang diteliti, yang mana setiap partai politik mempunyai mekanisme kaderisasi yang berbeda – beda.
3. Shela Perila Octrien yang dilakukan tahun 2020, dengan judul *Pola Pengkaderan Partai Politik Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang*. Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pola pengkaderan yang dilakukan DPC PKB kota Palembang?, bagaimana eksistensi kader PKB ditingkat politik lokal kota Palembang?. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelembagaan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat tiga tahapan yang dilakukan PKB dalam proses kaderisasi. Tahapan tersebut yaitu: *pertama*, tingkat dasar yaitu pendidikan mengenai pentingnya berorganisasi, penanaman loyalitas dalam

---

<sup>32</sup> Novia Putri Pangesti, *Kaderisasi Partai Politik Dalam Mengupayakan Kualitas Ideologi Penelitian Deskriptif – Kualitatif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, xi.



berorganisasi. *Kedua*, tingkat menengah yaitu penanaman ideologi partai terhadap kader, pengembangan kreativitas dan pengembangan organisasi. *Ketiga*, tingkat lanjut yaitu memberikan pendidikan agar kader mempunyai kualitas konseptual, memberikan pelatihan agar kader dapat menganalisis peristiwa – peristiwa politik serta cara memecahkan masalah<sup>33</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakuakn peneliti adalah, sama – sama membahas pengkaderan yang dilakukan partai politik, serta persamaan metode yang digunakan dalam penelitian. Perbedaanya yaitu dilakukan ditingkat DPC dengan partai politik PKB, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah ditingkat DPD serta partai yang diteliti adalah PKS.

4. Yuni Femelia yang dilakukan pada tahun 2017, dengan judul *Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam meningkatkan Kualitas Berpolitik Studi Pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung*. Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pola pengkaderan yang dilakukan DPC PKB kota Bandar Lampung?, apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam pengkaderan yang dilakukan DPC PKB kota Bandar Lampung?. Jenis penelitian ini adalah *Field Research*. Dalam penelitian ini menggunakan teori kaderisasi, kualitas kader, dan juga kualitas partai politik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kaderisasi DPC PKB Kota Bandar Lampung mempunyai tiga jenjang pengkaderan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat lanjut. Setelah kader dapat melewati beberapa tahapan kaderisasi, kader sudah termasuk bagian dari PKB yang memiliki kewajiban untuk menjalankan visi dan misi PKB. Tidak hanya itu kader juga bertugas untuk mensosialisasikan PKB agar lebih dikenal khususnya masyarakat awam, dengan tujuan partai dapat memiliki dukungan yang besar dari masyarakat. Kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Bandar Lampung dapat dilakukan melalui seminar, dialog, workshop, kampanye pengenalan partai dan yang lainnya. Kaderisasi yang dilakukan PKB di Kota Bandar Lampung masih bersifat formalitas saja,

---

<sup>33</sup> Shela Perila Octrien, *Pola Pengkaderan Partai Politik Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang*, x.

oleh karena itu masih diperlukanya peningkatan terkait kaderisasi yang dilakukan<sup>34</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama melakukan penelitian terkait proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan adalah berbedanya partai politik yang diteliti. Sedangkan partai politik mempunyai sistem kaderisasi yang berbeda – beda.

5. Raden Gilang Candra Negara yang dilakukan tahun 2019, dengan judul *Sistem Kaderisasi Partai Politik( Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul*). Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, Bagaimana sistem kaderisasi di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini mneggunakan beberapa teori yaitu teori partai politik, sistem kepartaian, kaderisasi partai politik, dan juga kaderisasi PDI Perjuangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, proses kaderisasi yang dilakukan oleh PDI perjuangan yang berada di DPC Kabupaten Bantul, memakai sistem berjenjang dan sistematis yang berada dalam pengawasan DPP Partai, atau kaderisasi sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam partai politik. Beberapa tahapan yang dilakukan PDI Perjuangan DPC Kabupaten Bantul dalam proses kaderisasi yaitu, memberikan pendidikan terhadap kader, memberikan tugas pendidikan terhadap kader, serta memberikan penugasan karir terhadap kader. Dalam tahap pendidikan terhadap kader, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pada tahap penugasan pendidikan terhadap kader, akan diberikan tugas untuk berpartisipasi dalam sosialisasi, diberikanya tugas untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, serta menyelenggarakan kuliah umum terkait empat pilar kebangsaan. Pada jenjang penugasan karir, kader akan memperoleh tugas diluar struktur partai, yang mana kader akan mendapatkan tugas karir di lembaga

---

<sup>34</sup> Yuni Femelia, *Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam meningkatkan Kualitas Berpolitik Studi Pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung*, ii.

legislatif, eksekutif, serta serta jabatan publik yang lainnya<sup>35</sup>. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah, sama – sama menggunakan teori kaderisasi dan juga adanya persamaan terkait metode penelitian yang dilakukan. Adapun perbedaannya terletak pada partai yang diteliti yaitu penelitian ini melakukan penelitian mengenai kaderisasi yang dilakukan oleh PKB, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang strategi kaderisasi yang dilakukan oleh PKS.

Adapun dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan, dapat disimpulkan terkait persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu, sama – sama mengkaji tentang proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Persamaan lain terletak pada jenis penelitian yang dilakukan, yaitu sama – sama jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tidak hanya itu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data juga sama – sama menggunakan teknik wawancara serta mengambil data dari jurnal, media, berita, dan yang lainnya.

Adapun kesimpulan terkait perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan yaitu, mengenai partai politik yang diteliti. Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kaderisasi PKB, PPP, dan partai yang lainnya. Sedangkan partai yang peneliti kaji adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam penelitian terdahulu yang peneliti paparkan, terdapat peneliti lain yang mengkaji tentang kaderisasi PKS, tapi hanya berfokus pada gerakan dakwahnya saja. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji adalah, terkait semua mekanisme yang dilakukan PKS dalam melakukan kaderisasi, termasuk program – program yang dilakukan oleh PKS dalam proses kaderisasi.

### C. Kerangka Berpikir

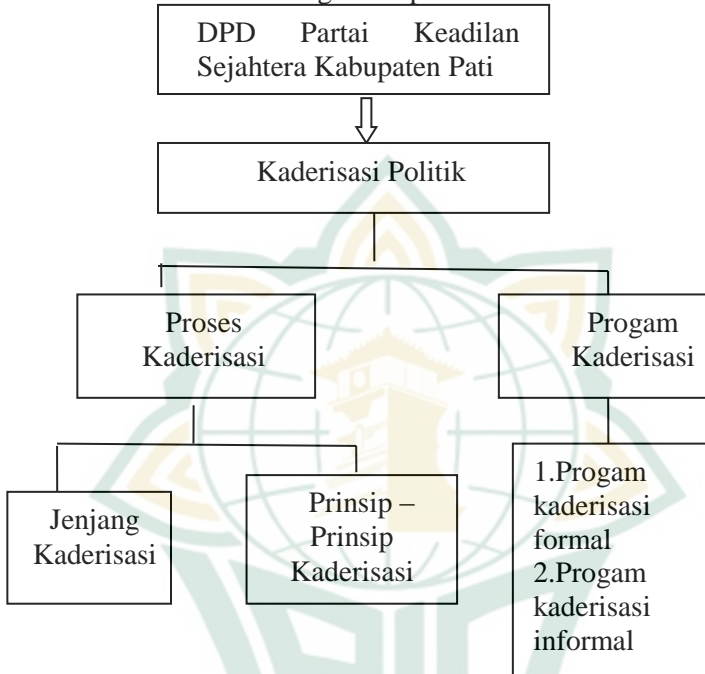
Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual terkait teori yang mempunyai hubungan dengan faktor – faktor yang sudah diidentifikasi sebagai kategori suatu masalah yang penting. Kerangka berpikir yang ideal, merupakan kerangka berpikir yang dapat

---

<sup>35</sup> Raden Gilang Candra Negara, *Sistem Kaderisasi Partai Politik( Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul)*, ix.

menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya dalam penelitian yang akan diteliti<sup>36</sup>. Dapat dilihat alur kerangka berpikir peneliti tentang proses kaderisasi PKS dalam meningkatkan kualitas kader pada gambar 2.3, sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan, terkait strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan kualitas kader, terdapat beberapa mekanisme dalam kaderisasi guna meningkatkan kualitas kader. Adapun dalam mekanisme tersebut terdapat proses kaderisasi, yang mana dalam proses kaderisasi terdapat jenjang kaderisasi, dan prinsip – prinsip kaderisasi yang harus dijalankan. Selain itu dalam gambar 2.3 juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang dilakukan dalam kaderisasi berupa program kaderisasi formal dan program kaderisasi informal.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.